ABSTRAK

Tindak pidana korupsi di Indonesia Perkembangannya terus meningkat dari ahun ke tahun. Tindak pidana korupsi telah menjadi suatu kejahatan yang luar biasa. Dengan demikian upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut dengan cara yang luar biasa. Pemberantasan korupsi adalah dengan mengandalkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Dalam penanganan tindak pidana korupsi Jaksa berperan sebagai penyidik dan juga sebagai penuntut umum.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Ambarawa, (2) Faktor-fakror apa saja yang menghambat Jaksa dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Ambarawa ? (3) Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Jaksa dalam melakukan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Ambarawa ?

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Untuk Menganalisis dan menjelaskan proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Ambarawa. (2) Untuk menganalisis dan menjelaskan Faktor-fakror yang menghambat Jaksa dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Ambarawa. (3) Untuk menganalisis dan menjelaskan upaya yang dilakukan oleh Jaksa dalam melakukan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Ambarawa.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, sedangkan pendekatannya dengan pendekatan yuridis sosiologis.

Hasil penelitian menunjukan bahwa Lembaga Kejaksaan berperan dalam penanganan tindak pidana korupsi di Ambarawa. Dalam proses penanganan tindak pidana korupsi jaksa sebagai penyidik dan sebagai penuntut umum. Hambatan yang ditemukan jaksa adalah dalam hal terjadinya tindak pidana korupsi ada seseorang yang mengetahui telah terjadi tindak pidana korupsi, tetapi tidak melaporkan karena takut kepada atasan, dilarang oleh rekan sesama pelaku tindak pidana korupsi, karena tidak mau, saksi dan terdakwa sering berpindah-pindah, kesulitan dalam hal penyidik menemukan harta benda tersangka. Berdasarkan penelitian tersebut disarankan kepada penegak hukum khususnya Lembaga Kejaksaan di Ambarawa untuk meningkatkan kinerjanya. Selain itu dalam melaksanakan tugasnya sebagai penuntut umum, jaksa harus bekerja jujur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, perlunya peningkatan koordinasi diantara sesama penegak hukum atau instansi yang terkait dalam penanganan tindak pidana korupsi, penyidikan harus dilakukan dengan sungguh-sungguh guna menemukan bukti yang kuat.

Kata Kunci : Peran, Kejaksaan, Tindak Pidana, Korupsi

ABSTRACT

Corruption in Indonesia Progress continues to increase from year to year. Corruption has become an extraordinary crime. Thus the eradication measures can no longer be carried out normally, but is charged with an extraordinary way. Combating corruption is to rely on Law No. 20 of 2001 on Corruption Eradication. In the handling of corruption prosecutors act as investigators and as well as a public prosecutor.

Issues examined in this study were: (1) How is the process of law enforcement against perpetrators of corruption in the jurisdiction of the State Attorney Ambarawa, (2) Factors fakror what is constraining Attorney in law enforcement against perpetrators of corruption in the jurisdiction of the Attorney State Ambarawa? (3) How is the effort made by the prosecutor in the prevention of corruption in the jurisdiction of the State Attorney Ambarawa?

The purpose of this study are as follows: (1) To analyze and explain the process of law enforcement against corruption in the jurisdiction of the State Attorney Ambarawa. (2) To analyze and explain the factors that inhibit the Attorney-fakror in law enforcement against perpetrators of corruption in the jurisdiction of the State Attorney Ambarawa. (3) To analyze and explain the efforts made by the prosecutor in the prevention of corruption in the jurisdiction of the State Attorney Ambarawa.

The method used in this research is qualitative method, whereas the approach with sociological juridical approach.

The results showed that the Attorney Institution role in handling corruption in Ambarawa. In the process of handling of corruption prosecutors as an investigator and as a public prosecutor. Barriers were found prosecutors are in terms of corruption there is someone who knows there has been a corruption, but did not report for fear of the boss, is prohibited by fellow perpetrators of corruption, because they do not want to, witnesses and defendants often sedentary, difficulties in terms of possessions investigators found the suspect. Based on these studies suggested to law enforcement in particular the Attorney Institution in Ambarawa to improve its performance. In addition to his duties as a public prosecutor, the prosecutor should work honestly in accordance with Regulation Legislation, the need to improve coordination amongst law enforcement agencies or institutions involved in the handling of corruption, investigations must be carried out in earnest to find evidence.

Keywords : Role, Attorney, Crime, Corruption